

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan pendapat Hadiyanti dalam (Novitasari, 2020, hlm. 33) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu upaya untuk membebaskan masyarakat dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan, dengan tujuan akhir untuk memampukan dan memandirikan mereka.

Menurut Jim Ife, dalam (Nopriansyah, 2023, hlm. 91) pemberdayaan adalah upaya memberikan sumber daya, kesempatan, dan kemampuan kepada masyarakat agar mereka mampu mengendalikan masa depannya sendiri dan mempengaruhi perubahan dalam komunitasnya, Jim Ife juga menyatakan bahwa inti dari pemberdayaan berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan mengatasi ketimpangan. Oleh karena itu, untuk memahami pemberdayaan, dapat digunakan empat sudut pandang, yaitu elitis, strukturalis, dan pst-strukturalis.

Menurut Pranarka & Vidhyandika dalam (Taqiyah & Fajriyanto, 2021, hlm. 406) pemberdayaan pada hakikatnya adalah proses yang mengkonstruksi hubungan subjek dan objek. Dalam proses ini, subjek (pemberdayaan) menyadari dan mengakui potensi yang melekat pada objek (yang diberdayakan). Esensi dari pemberdayaan adalah redistribusi kekuasaan atau “daya” dari subjek kepada objek. Akibatnya, tujuan akhir pemberdayaan adalah transformasi status individu dari yang semula hanya sebagai objek menjadi subjek yang mandiri. Dengan demikian, struktur sosial yang terbentuk nanti bukan lagi hubungan subjek-objek, melainkan interaksi yang setara antara subjek dengan subjek lainnya.

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja dalam (Anita, 2020, hlm. 30) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk mengoptimalkan kapasitas dan potensi warga, agar mereka mampu meneguhkan identitas, harga diri, dan martabatnya. Hal ini bertujuan membangun kemandirian dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan di berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial agama, dan budaya. Sedangkan menurut Mubarak dalam (Anita, 2020, hlm. 30)

pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses untuk memulihkan dan menguatkan kapasitas suatu komunitas, sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam menjalankan hak serta kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat. Foy dalam (Anita, 2020, hlm. 30) menguraikan bahwa inti dari pemberdayaan masyarakat seringkali didefinisikan sebagai pemberian kewenangan (*authority*) agar masyarakat dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada komunitas mereka. Berdasarkan pendapat Chambers dalam (Anita, 2020, hlm. 30) pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial. Sebagai sebuah paradigma baru, konsep ini berfokus pada prinsip yang berpusat pada manusia (*people-centered*), bersifat partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan sebuah proses transformatif sekaligus paradigma pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pengoptimalan kapasitas dan pemberian kewenangan kepada komunitas. Proses ini bertujuan membangun kemandirian dengan meneguhkan identitas, harga diri, dan martabat masyarakat, sehingga mereka mampu beradaptasi secara bermakna dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Sebagai sebuah paradigma holistik, pemberdayaan masyarakat mengintegrasikan nilai-nilai sosial dengan pendekatan yang berpusat pada manusia, bersifat partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial dan budaya.

b. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Adi dalam (Dewi et al., 2021, hlm. 2) ada beberapa tahap pemberdayaan masyarakat mempunyai rumusan strategi dalam melakukan pemberdayaan yaitu:

1) Tahap Pesiapan (*Engagement*)

Fase kunci ini berfokus pada dua hal mendasar, yaitu mempersiapkan tenaga fasilitator dan kondisi lokasi. Keberhasilan tahap ini menjadi fondasi bagi seluruh program pemberdayaan selanjutnya.

2) Tahap Pengkajian (*Assessment*)

Pada tahap ini, masyarakat dilibatkan secara aktif untuk mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dimiliki di wilayah mereka. Keterlibatan ini penting karena masyarakat yang paling memahami kondisi di tempat tinggal mereka.

3) Tahap Perencanaan Alternatif (*Designing*)

Bersama dengan perwakilan masyarakat, dirumuskan berbagai rencana program untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Perencanaan ini dirancang agar program tidak hanya bersifat amal jangka pendek, tetapi mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan.

4) Tahap Penyusunan Rencana Aksi (*Designing*)

Masyarakat dan fasilitator bekerja sama secara intensif untuk merinci rencana menjadi suatu dokumen tertulis yang jelas, mencakup tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

5) Tahap Pelaksanaan (*Implementation*)

Ini adalah tahap penerapan nyata dari semua program yang telah disusun bersama. Pada fase ini, terjalin sinergi dan kolaborasi langsung antara masyarakat dengan pelaku pemberdayaan.

6) Tahap Evaluasi

Tahap ini merupakan proses pemantauan partisipatif yang melibatkan warga dan fasilitator untuk menilai program yang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur indikator keberhasilan dan mengkonsolidasikan kebiasaan atau perubahan positif yang telah tercapai.

7) Tahap Terminasi (*Disengagement*)

Tahap ini dimulai ketika program telah berjalan dengan baik dan mandiri. Fasilitator secara bertahap mulai mengurangi perannya dan mengakhiri hubungan kerja formal, namun tidak serta merta meningkatkan komunitas sepenuhnya.

Menurut Sumardjo dalam (Kiki Endah, 2020, hlm. 137) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses untuk membuka akses terhadap sumber daya, sekaligus membangun kemauan dan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, mereka memiliki kapasitas untuk menentukan masa depannya sendiri melalui

partisipasi aktif dalam membentuk dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka dan komunitasnya. Selaras dengan hal itu dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dalam (Kiki Endah, 2020, hlm. 137) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan menurut Widjaja dalam (Kiki Endah, 2020, hlm. 137) inti pemberdayaan adalah menggerakkan seluruh potensi desa untuk mencapai tujuannya, yaitu memajukan perekonomian dan menciptakan kesejahteraan, dengan cara membangkitkan motivasi, kreativitas Masyarakat.

c. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas Perempuan agar memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber daya, berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, serta memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan diri dan keluarganya. Melalui proses ini, Perempuan diharapkan dapat menjadi lebih mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup. Pemberdayaan Perempuan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan dalam bidang sosial, pendidikan, politik, dan budaya.

Berdasarkan pendapat dari (Astuti, 2021, hlm. 17) menyatakan bahwa pemberdayaan Perempuan adalah Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Perempuan melalui perluasan akses terhadap Pendidikan, pekerjaan, dan berbagai layanan, serta meningkatkan keterlibatan Perempuan dalam pengambilan Keputusan. Pemberdayaan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender dan meningkatkan kesejahteraan Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan menurut (Rahmi, 2021, hlm. 145) Pemberdayaan Perempuan merupakan Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Perempuan melalui Pendidikan, penguatan ekonomi, dan pemanfaatan teknologi agar Perempuan mampu mengembangkan usaha serta mencapai kemandirian ekonomi. Selaras dengan hal itu, (Lubem & Sarah, 2018) dalam (Rahmi, 2021, hlm. 145)

Pemberdayaan juga dipandang sebagai strategi untuk mengurangi ketidakadilan sosial dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan kelompok yang kurang berdaya. Menurut kemensos 2011, pemberdayaan Perempuan bertujuan memperluas akses dan control Perempuan terhadap sumber daya yang mendukung kehidupan mereka. Upaya ini menjadi penting karena Perempuan masih menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari norma sosial, budaya patriarki, kemiskinan, dan pembagian kerja berdasarkan gender yang dapat membatasi peran mereka dalam Pembangunan.

Suherman, 2017 dalam (Susanti & Patonah, 2020, hlm. 149) menyatakan, pemberdayaan perempuan dapat dipahami sebagai proses penguatan kemampuan perempuan dalam mengakses sumber daya, menentukan tindakan yang akan diambil, serta memperoleh manfaat yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Menurut (Suharto, 2014) dalam (Susanti & Patonah, 2020, hlm. 150) Pemberdayaan merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu, khususnya kelompok rentan dan kurang berdaya, agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, mengakses sumber daya produktif, meningkatkan pendapatan, serta memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Sementara itu, (Devi et al., 2024. hlm. 2) menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan strategi pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan perempuan, memperluas akses terhadap sumber daya, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

Berkaitan dengan hal tersebut, keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak terlepas dari sejauh mana program itu berjalan secara efektif. Sondang P. Siagian (2001) dalam (Herwina et al., 2023, hlm. 253) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketercapaian suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, di mana semakin hasil kegiatan mendekati atau mencapai sasaran tersebut, maka semakin tinggi efektifitasnya. Dengan demikian, efektivitas dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, yakni sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam upaya meningkatkan kemampuan, akses dan kesejahteraan perempuan.

Menurut Riant Nugroho (2008) (Marthalina, 2018. hlm. 75) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya meningkatkan kemampuan ekonomi perempuan melalui pengembangan usaha, pelatihan keterampilan berwirausaha, inovasi produk, dan akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Menurut Riant Nugroho (2008) dalam (Marthalina, 2018. hlm. 64) , pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai pelaku pembangunan. Selain itu, pemberdayaan perempuan diarahkan untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan sehingga perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan.

Pemberdayaan juga bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha, baik pada skala rumah tangga maupun usaha yang lebih besar, guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan kemandirian ekonomi. Di samping itu, pemberdayaan perempuan berupaya memperkuat peran organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai sarana untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan di lingkungan masyarakat. Riant Nugroho (2008) dalam (Marthalina, 2018, hlm. 65) juga berpendapat bahwa program pemberdayaan dapat diwujudkan melalui beberapa strategi, yaitu:

- 1) Memperkuat kelembagaan organisasi perempuan, seperti PKK, koperasi, dan yayasan sosial, agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program pembangunan secara efektif.
- 2) Meningkatkan peran organisasi perempuan dalam menyebarluaskan informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai program pemberdayaan.
- 3) Mendorong keterlibatan perempuan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi program, baik dalam bidang ekonomi, pembangunan fisik, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- 4) Mengembangkan kemampuan kepemimpinan perempuan agar memiliki kesempatan yang setara dalam pengambilan keputusan dan berperan aktif dalam pembangunan.
- 5) Meningkatkan kapasitas perempuan dalam bidang usaha melalui pelatihan keterampilan produksi, pengelolaan usaha, akses permodalan, serta pemasaran, sehingga dapat mendukung kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi perempuan melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, akses terhadap sumber daya, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan perempuan bertujuan mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan memperkuat peran perempuan sebagai subjek pembangunan yang aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan masyarakat (Anita, 2020, hlm. 16).

2.1.2 Hantaran Nikah

Menurut (Martirawati, 2017) dalam (Handayani et al., 2021, hlm. 34) menjelaskan bahwa hantaran pengantin merupakan tradisi dalam perkawinan yang mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Meskipun bentuknya dapat berubah, hantaran tetap memiliki makna penting sebagai simbol tanggung jawab, kesungguhan, dan penghargaan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Selain sebagai bagian dari prosesi pernikahan, hantaran juga mencerminkan nilai sosial dan budaya yang berperan dalam mempererat hubungan antar keluarga.

a. Hantaran Nikah sebagai Simbol Tanggung Jawab dan Keseriusan

Menurut (Ibrahim et al., 2023. hlm. 61) menjelaskan bahwa hantaran merupakan tradisi pemberian barang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan. Tradisi ini menjadi bagian dari budaya perkawinan yang memiliki nilai simbolis dan sosial dalam masyarakat. Hantaran dimaknai sebagai wujud penghormatan, keseriusan, dan tanggung jawab calon mempelai laki-laki terhadap calon pasangannya. Selain itu, hantaran juga mencerminkan kesiapan calon mempelai laki-laki dalam memenuhi perannya sebagai kepala keluarga serta menunjukkan komitmennya untuk

membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, mandiri, dan sejahtera. Dengan demikian, hantaran tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap adat perkawinan, tetapi juga sebagai simbol kesiapan dan kesanggupan dalam memasuki kehidupan berkeluarga. Adapun konsep yang bisa digunakan, yaitu:

1) Simbol Kesungguhan Calon Mempelai Laki-laki

Hantaran merupakan simbol kesungguhan calon mempelai laki-laki dalam menunjukkan komitmen dan kesiapan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Pemberian hantaran mencerminkan niat baik serta tanggung jawab calon mempelai laki-laki terhadap calon pasangan dan kehidupan keluarga yang akan dibangun bersama.

2) Bentuk Penghormatan kepada Keluarga Perempuan

Melalui pemberian hantaran, pihak calon mempelai laki-laki menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada calon mempelai perempuan beserta keluarganya. Tradisi ini mencerminkan pentingnya menjaga hubungan baik dan etika dalam proses perkawinan.

3) Sarana Mempererat Hubungan antar Keluarga

Proses penyerahan hantaran menjadi media untuk menjalin komunikasi dan memperkuat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Interaksi yang terjalin selama proses tersebut dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan memperkuat ikatan sosial sebelum berlangsungnya pernikahan.

4) Nilai Sosial dan Budaya

Tradisi ini merupakan bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan norma, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Oleh karena itu, hantaran tidak hanya dipahami sebagai simbol material, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian budaya yang mengandung makna sosial, penghormatan, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Hantaran Nikah sebagai Tradisi Sosial Budaya

Menurut (Ibrahim et al., 2023. hlm. 61) tradisi hantaran dalam masyarakat Melayu menunjukkan bahwa hantaran tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam prosesi perkawinan, tetapi juga mengandung makna sosial dan budaya yang mendalam. Hantaran menjadi simbol penghargaan, tanggung jawab, dan komitmen

calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Selain itu, keberadaan hantaran mencerminkan identitas budaya masyarakat Melayu serta berperan dalam memperkuat hubungan sosial dan kekeluargaan antara kedua belah pihak yang akan dipersatukan dalam ikatan perkawinan.

c. Hantaran Nikah sebagai Produk Kreatif Bernilai Ekonomi

(Septriani et al., 2023. hlm. 805) menjelaskan bahwa pelatihan keterampilan membuat hantaran dan seserahan pernikahan dapat mendorong perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif melalui pengembangan usaha jasa hantaran. Keterampilan yang diperoleh dari pelatihan tersebut memungkinkan perempuan menghasilkan produk yang memiliki nilai estetika dan nilai jual sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tambahan. Selain itu, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jasa pembuatan hantaran pernikahan menjadikan keterampilan ini memiliki prospek usaha yang cukup baik dalam mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga (Septriani et al., 2023. hlm. 805). Pelatihan keterampilan membuat hantaran dan seserahan pernikahan dapat membuka peluang usaha bagi ibu rumah tangga melalui pengembangan jasa pembuatan hantaran yang bernilai ekonomis. Melalui pelatihan tersebut, peserta memperoleh keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk kreatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterampilan yang dimiliki tidak hanya membantu perempuan memanfaatkan waktu luang secara produktif, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperoleh tambahan penghasilan dan mengembangkan usaha secara mandiri. Oleh karena itu, pelatihan pembuatan hantaran dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemberdayaan perempuan yang berorientasi pada peningkatan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga (Rahmad Akbar et al., 2024. hlm. 29).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hantaran nikah merupakan tradisi perkawinan yang mengandung nilai sosial, budaya, dan ekonomi. Hantaran menjadi simbol kesungguhan, tanggung jawab, dan penghormatan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan serta berperan dalam mempererat hubungan antar keluarga. Selain sebagai tradisi budaya, keterampilan membuat hantaran juga memiliki nilai ekonomi karena dapat menjadi peluang usaha yang mendukung

pemberdayaan perempuan, meningkatkan pendapatan, dan membantu kesejahteraan keluarga.

2.1.3 Ekomomi Keluarga

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan serta keinginan manusia menjadi semakin beragam. Kondisi tersebut mendorong Masyarakat untuk terus mengembangkan berbagai aktivitas dalam mengelola sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melalui kegiatan ekonomi. Perekonomian merupakan suatu sistem yang mengatur serta mengkoordinasikan berbagai aktivitas ekonomi yang melibatkan hubungan antara individu maupun Lembaga dalam Masyarakat. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan anggota keluarga yang Bersama serta saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga diartikan sebagai unit terkecil dalam Masyarakat yang dapat terdiri atas pasangan suami istri, pasangan suami istri beserta anak-anaknya, ayah beserta anak-anaknya atau ibu beserta anak-anaknya. Dengan demikian, keluarga memiliki peran penting sebagai lingkungan utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial anggotanya (Vernia, 2017, hlm. 109).

Case dan Fair (2007) dalam (Hanum & Safuridar, 2018. hlm. 44) menyebutkan bahwa pendapatan individu umumnya bersumber dari tiga kategori utama. Pertama, pendapatan berasal dari upah atau gaji yang diterima sebagai kompensasi atas pekerjaan. Kedua, pendapatan diperoleh dari kepemilikan aset misalnya modal, tanah, atau bentuk properti lain yang menghasilkan imbal hasil. Ketiga, pendapatan dapat berasal dari transfer pemerintah, seperti subsidi, bantuan sosial, atau pembayaran tunjangan. Sementara itu menurut Reksohadiprodjo (2000) dalam (Hanum & Safuridar, 2018. hlm.44) mengaitkan pendapatan berperan penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan keluarga. Hal tersebut sejalan dengan asumsi bahwa individu menilai pekerjaan berdasarkan imbalan yang diterima serta kondisi kerja yang mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut. Menurut Wirosuhardjo (2006) (Hanum & Safuridar, 2018. hlm. 44), banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi tingkat kebutuhan ekonomi rumah tangga. Semakin besar jumlah tanggungan, semakin tinggi pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Keadaan ini mendorong anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, peningkatan jumlah tanggungan keluarga akan diikuti oleh meningkatnya kebutuhan pendapatan.

Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut dapat menyebabkan keluarga berada dalam kondisi kemiskinan. Selaras dengan hal itu, Para ahli ekonomi pada umumnya berpendapat bahwa pertumbuhan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi, baik sebagai faktor pendukung maupun penghambat. Di satu sisi, bertambahnya jumlah penduduk dapat meningkatkan ketersediaan tenaga kerja dan memperluas pasar. Di sisi lain, jika pertumbuhan penduduk tidak diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja dan kualitas sumber daya manusia, maka berpotensi meningkatkan angka pengangguran yang dapat berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi.

Ekonomi adalah ilmu yang mengkaji proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumber daya yang terbatas oleh individu maupun masyarakat guna memenuhi kebutuhan serta keinginan terhadap barang dan jasa yang pada dasarnya tidak terbatas. menurut Hendri Faisal Noor dalam (Fikri et al., 2021. hlm. 45), ekonomi dapat dipahami sebagai segala bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, secara konseptual sebagian besar aktivitas manusia berkaitan dengan upaya memperoleh dan memanfaatkan berbagai sumber daya guna memenuhi kebutuhan serta keinginan hidupnya. Sedangkan keluarga menurut George Murdock dalam bukunya *Social Structure*, keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang ditandai dengan kehidupan bersama, adanya kerja sama dalam bidang ekonomi, serta berlangsungnya proses reproduksi (Lestari, 2012) dalam (Fikri et al., 2021. hlm. 45). Sementara itu, Notosoedirjo (2002) dalam (Fikri et al., 2021. hlm. 45) menjelaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling dekat dengan individu karena di dalamnya terjalin hubungan yang erat antar anggota keluarga. Lingkungan keluarga mencakup berbagai aspek, seperti tempat

tinggal, pola interaksi, nilai-nilai yang dianut, cara berpikir, serta kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keluarga juga berperan dalam menyaring pengaruh budaya dari luar dan menyesuaikannya dengan kondisi lingkungan sekitar (Matali, 2018) dalam (Fikri et al., 2021. hlm. 45). Dengan demikian, keluarga dapat dipahami sebagai lembaga sosial yang memiliki berbagai fungsi penting dalam membangun, membina, dan mengembangkan hubungan antar anggota keluarga.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi keluarga merupakan kajian mengenai cara keluarga mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keluarga sebagai unit sosial dan ekonomi terkecil memiliki peran penting dalam kegiatan produksi, konsumsi, serta pengelolaan pendapatan. Tingkat kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendapatan, jumlah tanggungan, dan kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan dan pengelolaan ekonomi yang baik menjadi faktor penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup.

Setiawati (2018) dalam (Shihab & Mugiyono, 2023. hlm. 470) menjelaskan bahwa ekonomi keluarga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Ketersediaan sumber daya ekonomi yang memadai membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup, mengatasi permasalahan ekonomi, dan meningkatkan ketahanan keluarga. Dengan kondisi ekonomi yang baik, keluarga dapat menjalankan berbagai fungsi keluarga secara lebih efektif guna mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Ada beberapa manfaat dari ekonomi keluarga, yaitu:

1) Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Kondisi ekonomi yang memadai memungkinkan keluarga mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Kesejahteraan tersebut ditunjukkan melalui kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan pendapatan yang dimiliki.

2) Membantu Keluarga menghadapi Tekanan Ekonomi

Ketersediaan sumber daya ekonomi yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Melalui kondisi

ekonomi yang baik, keluarga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan, mengelola berbagai permasalahan ekonomi, serta menghadapi situasi darurat tanpa harus mengurangi pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan penting keluarga. Dengan demikian, kecukupan ekonomi berperan dalam menjaga stabilitas kehidupan keluarga dan mendukung tercapainya kesejahteraan anggota keluarga secara menyeluruh.

3) Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga

Kesejahteraan keluarga merupakan kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan perkembangan anggota keluarga secara layak sesuai dengan standar sosial yang berlaku di masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar mencakup aspek pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, sedangkan kebutuhan perkembangan berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga.

4) Meningkatkan Pendapatan dan Kualitas Hidup Keluarga

Semakin baik kondisi ekonomi keluarga, semakin besar kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup anggotanya secara layak. Kondisi ekonomi yang memadai memungkinkan keluarga memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas hidup.

5) Memperkuat Ketahanan dan Keberlangsungan Keluarga

Stabilitas ekonomi keluarga berperan penting dalam mendukung keberlangsungan kesejahteraan keluarga, karena memungkinkan keluarga menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal serta memenuhi kebutuhan anggota keluarga secara berkelanjutan.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Embon Bulan (2022) dengan penelitian yang berjudul “Peran Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi keluarga di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Islam)”. Penelitian ini membahas mengenai peningkatan ekonomi keluarga melalui pelaksanaan pekerjaan sampingan di samping tugas utama sebagai ibu rumah tangga. Keterlibatan mereka terbukti membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga. Dari perspektif hukum Islam, peran perempuan dalam membantu pemenuhan ekonomi

keluarga diperbolehkan selama mengikuti kaidah-kaidah syariah yang relevan, yakni berpijak pada ketentuan Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip muamalah. Pelaksanaan kegiatan ekonomi oleh istri harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk kewajiban memperoleh izin atau persetujuan suami sesuai ketentuan keluarga yang berlaku. Secara keseluruhan, kontribusi perempuan di Desa Watang Kassa tidak hanya memperkuat kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga selaras dengan ketentuan hukum Islam apabila aktivitas tersebut dilakukan dengan memperhatikan batasan dan izin yang diperlukan.

(Septriani et al., 2023. hlm. 805) dengan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Keterampilan Membuat Hantaran dan Sederahan Pernikahan di Kelurahan Pasar Bengkulu”. Penelitian ini membahas mengenai program yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari dukungan masyarakat sejak tahap persiapan, tingginya partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung, serta meningkatnya pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan motivasi peserta setelah mengikuti program. Dengan demikian, program ini mampu memberikan manfaat yang nyata serta berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas peserta melalui pelaksanaan kegiatan yang partisipatif dan terarah.

Berliana Rahma (2024) dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Kerja PKK Akademia dalam Meningkatkan Pemberdayaan Anggota di Kabupaten Ponorogo”. Peneliti ini membahas mengenai program PKK Akademia di Ponorogo sebagai bentuk regenerasi kader, telah diimplementasikan secara cukup efektif dalam memberdayakan anggotanya. Keberhasilan ini didukung oleh kerangka regulasi yang jelas, perencanaan yang matang, dan sistem pengawasan. Namun, efektivitasnya secara keseluruhan masih dibatasi oleh kapasitas kelembagaan yang rendah, berupa jumlah kader yang terbatas dan proses rekrutmen yang belum optimal.

Vikka Yunitasari (2019) dengan penelitian yang berjudul “Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal”. Penelitian ini membahas mengenai peran PKK dalam memberdayakan perempuan di Desa Cepiring belum optimal karena dua alasan utama, program PKK

masih monoton dan tidak inovatif sehingga tidak menarik minat perempuan yang sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing, sosialisasi hanya bersifat perwakilan akibat kendala keaktifan pengurus luas wilayah keterbatasan dana dan partisipasi perempuan yang banyak bekerja di luar rumah.

Riska Indahni Putri (2024) dengan penelitian yang berjudul “ Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”. Berdasarkan penelitian, partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci dalam organisasi PKK telah sejalan dengan visi misinya, keterlibatan masyarakat dan dukungan sarana prasarana masih terbatas. Faktor penghambatnya bersifat timbal balik dari sisi penggerak PKK, program tidak berjalan berkelanjutan, sementara dari sisi masyarakat, antusiasme untuk berkontribusi sangat minim.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini mengkaji permasalahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa Sukapura, yang mengalami ketimpangan partisipasi masyarakat dan dampak yang belum optimal. Fokus pembahasan meliputi keterampilan ekonomi. Oleh karena itu, untuk memahami penelitian pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan program PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Sukapura diperlukan kerangka konsep berupa input, proses, output, dan outcome. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk lebih sejahtera. Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar mereka akan dimanfaatkan secara maksimal setelah adanya program PKK ini. Seperti di Desa Sukapura pelatihan membuat hantaran nikah adalah salah satu cara yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga masyarakat disana bisa meningkatkan keterampilan dan kemampuannya dalam membuat hantaran menjadi produk yang nilai jual atau sewanya tinggi.

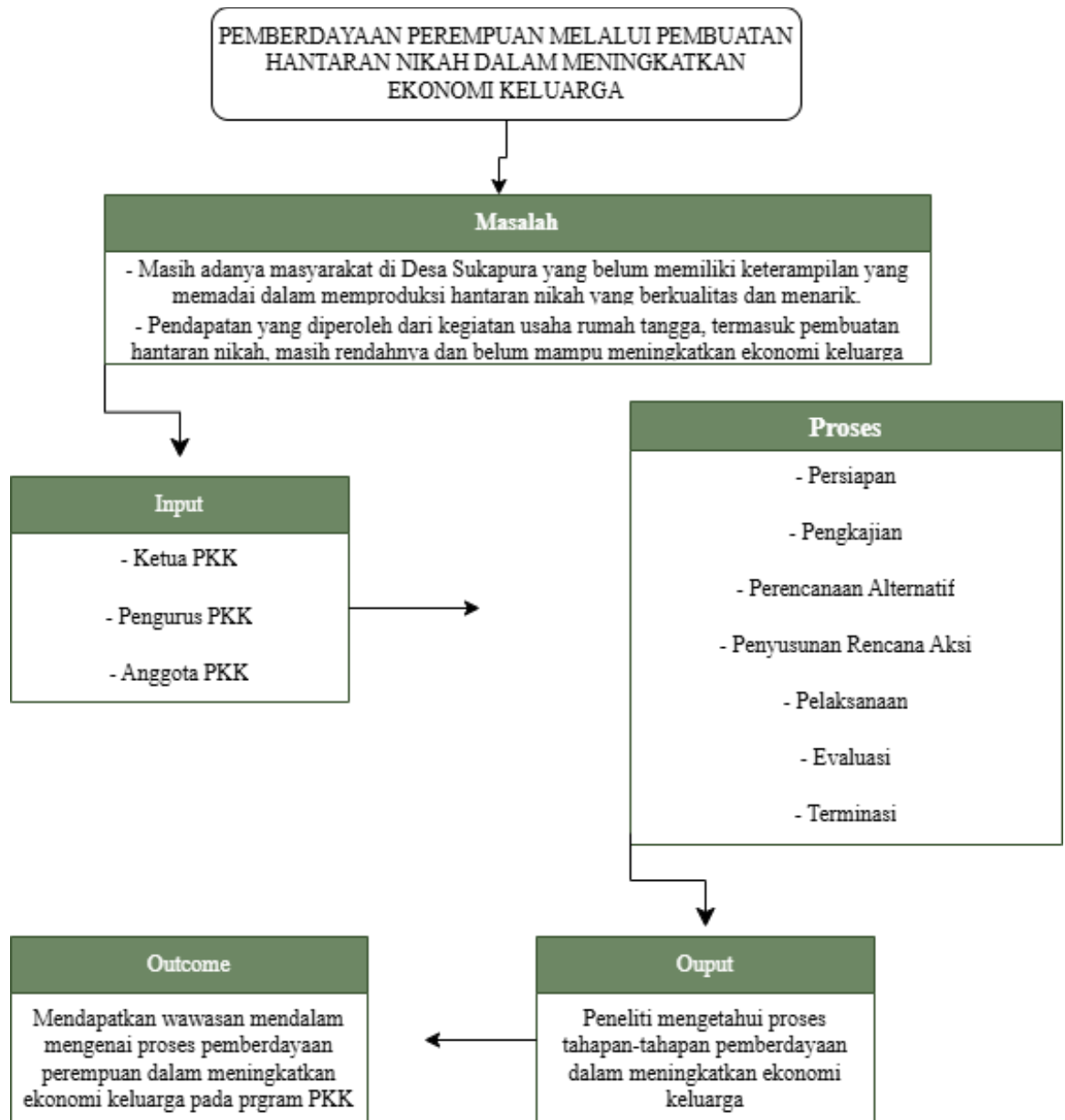
Input pada pemberdayaan masyarakat melalui program PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu, ketua PKK, Sekretaris PKK, Pengurus PKK, Anggota PKK yang merupakan pilar penting untuk memenuhi permasalahan yang ada secara internal serta bisa mengedukasi masyarakat lainnya untuk

diberdayakan agar ada generasi penerus untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Sukapura .

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan yaitu dengan diadakannya pemberdayaan masyarakat melalui program PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat, berupa 1. Tahap Persiapan (*Engagement*), 2. Tahap Pengkajian (*Assessment*), 3. Tahap Perencanaan Alternatif (*Designing*), 4. Tahap Penyusunan Rencana Aksi (*Designing*), 5. Tahap Pelaksanaan (*Implementation*), 6. Tahap Evaluasi, 7. Tahap Terminasi (*Disengagement*).

Output penelitian mengetahui proses dan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pada program PKK.

Outcome yang diharapkan mendapatkan wawasan mendalam mengenai proses pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pada program PKK.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual